

KETERKAITAN NILAI INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Yuhilza Hanum
Program Pascasarjana Sosial Budaya, Universitas Gunadarma
Jl. Margonda Raya 100, Depok 16424
yuhilza@staff.gunadarma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menghubungkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan hasil evaluasi tahun 2019 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). SPBE saat ini harus dilakukan di seluruh Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018. Kementerian dan Lembaga yang merupakan instansi pusat, bersama dengan Pemerintah Daerah harus memiliki SPBE. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan. Hasil evaluasi SPBE tahun 2019 untuk Pemerintah Provinsi dikaitkan dengan nilai PAD untuk provinsi yang bersangkutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai PAD yang tinggi tidak menjamin nilai indeks SPBE yang tinggi pula.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, SPBE*

Abstract

This study connects the index of Electronic-Based Government Systems (SPBE) which is the result of the evaluation in 2019 with Original Local Government Revenue (PAD). SPBE must now be implemented throughout Indonesia, in accordance with Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2018. Ministries and institutions which are central agencies, together with the Regional Government must implement SPBE. The preparation of SPBE plans and budgets by the Regional Government is coordinated by the regional apparatus responsible for development planning. The results of the 2019 SPBE evaluation for the Provincial Government are linked to the PAD value for the province concerned. The analysis shows that a high PAD value does not guarantee a high SPBE index value.

Keywords: *Original Local Government Revenue, SPBE*

PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dapat menggunakan sistem ini untuk mengatasi keterbatasan komunikasi karena kendala geografis.

Pemerintah telah menetapkan peraturan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomer 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pasal 22 PP tersebut mengatur tentang rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah. Setiap

Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE, dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam Ringkasan APBD 2018 (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2018) dikatakan bahwa komposisi pendapatan daerah dalam APBD terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tingkat provinsi, perimbangan dana perimbangan dan PAD hampir sama besar.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara nilai indeks SPBE dengan PAD provinsi. Indeks SPBE yang digunakan merupakan hasil evaluasi tahun 2019. PAD diambil dari tahun yang sama yaitu tahun 2019.

KERANGKA TEORI

SPBE melingkupi cakupan yang lebih luas dari *e-government*, karena di dalamnya terdapat kebijakan, tata kelola, dan layanan. Bahasan literatur mengenai SPBE masih sangat sedikit, atau masih menggunakan nama *e-government*. Dana untuk *e-government* yang dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar masih dalam kaitannya dalam membangun sistem.

Hasil survey yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (*Department of Economic and Social Affairs*, 2018) menyatakan bahwa terdapat perbedaan kapasitas pendanaan dan pendekatan nasional dalam implementasi *e-government*. Yang pertama dilakukan pemerintah India, misalnya, adalah membangun jaringan fiber optik nasional pada tahun. Negara Prancis memfokuskan hampir seluruh investasi pemerintah untuk daerah pedesaan, sementara daerah perkotaan didukung oleh operator sektor swasta.

Martins, Zambalde, Grützmann, de Souza Bermejo, Almeida, Nascimento (2019) menjelaskan bahwa inovasi nilai selalu diinginkan dari proyek pemerintah yang spesifik, yang menghasilkan manfaat dan mengurangi biaya (Martins et.al, 2019, p. 165). Inovasi nilai pada sektor publik terdiri dari penetapan strategi dan praktik yang baru, yang dapat mencapai dampak sosial yang tinggi dengan biaya yang rendah (Martins et.al, 2019, p. 166).

Aritonang (2017, p.108) mengemukakan bahwa pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pengembangan sistem *e-government*. Upaya terkait dana adalah dengan memberikan hibah guna mendukung pemerintah lokal, walaupun masih belum mencukupi.

Dari kajian-kajian tersebut dapat diuji keterkaitan nilai indeks SPBE provinsi di Indonesia dengan PAD. Indeks SPBE mewakili keberhasilan implementasi SPBE di provinsi tersebut. Pengujian ini juga dikuatkan oleh informasi dari Ringkasan APBD (2018) yang menyebutkan bahwa PAD dan dana perimbangan hampir sama pada tingkat provinsi. Hal ini juga didukung oleh penelitian Aritonang (2017) yang menyebutkan bahwa dukungan dari pemerintah pusat belum mencukupi.

Hipotesis: Terdapat hubungan antara nilai indeks SPBE provinsi dengan PAD.

METODE PENELITIAN

Data indeks SPBE untuk penelitian ini diambil dari hasil evaluasi tahun 2019 (<http://spbe.go.id/moneval>). Tidak semua provinsi bersedia nilai indeksnya dicantumkan pada situs ini. Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 22 yang nilai indeksnya dipublikasikan. PAD provinsi didapat dari Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id>). Karena hubungan antara nilai indeks SPBE dengan besarnya PAD masih harus dibuktikan, maka digunakan perumusan fungsi sebagai berikut:

$$y = f(x)$$

dengan: y = nilai indeks SPBE

x = nilai PAD (rupiah)

Tabel 1. Urutan Provinsi Berdasarkan Nilai Indeks SPBE Hasil Evaluasi Tahun 2019

No.	Provinsi	Indeks SPBE	PAD (ribu rupiah)
1	A	3.85	14.112.159.378
2	B	3.51	3.609.065.922
3	C	3.43	1.921.564.734
4	D	3.12	19.765.448.937
5	E	3.10	2.491.393.000
6	F	3.10	16.825.138.567
7	G	3.04	5.452.964.353
8	H	3.03	3.647.605.586
9	I	2.96	7.583.849.755
10	J	2.83	3.329.244.877
11	K	2.77	1.682.135.490
12	L	2.73	1.252.765.640
13	M	2.66	4.133.010.825
14	N	2.45	3.423.635.941
15	O	2.41	2.046.976.954
16	P	2.40	1.188.157.368
17	Q	2.24	1.131.943.379
18	R	1.91	532.803.031
19	S	1.83	7.344.821.273
20	T	1.78	560.761.385
21	U	1.61	1.524.642.944
22	V	1.61	370.109.976

Sumber: <http://spbe.go.id/moneval> dan <https://www.bps.go.id> (Data diolah).

Dalam pembuatan tabel, data diurutkan berdasarkan nilai indeks SPBE dengan nama provinsi yang diganti dengan alfabet dari A sampai V. Selanjutnya data diurutkan kembali berdasarkan nilai PAD. Untuk melihat hubungan bahwa $y = f(x)$, atau nilai indeks SPBE merupakan fungsi dari PAD, dibuat pula grafik garis antara keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian hasil dan pembahasan dimulai dengan penyajian nilai indeks SPBE dan PAD tahun 2019. Tabel 1 menyajikan urutan provinsi berdasarkan nilai indeks SPBE tertinggi sampai terendah.

Sebagai perbandingan, Tabel 2 menyajikan data yang sama dengan urutan dari PAD yang terbesar.

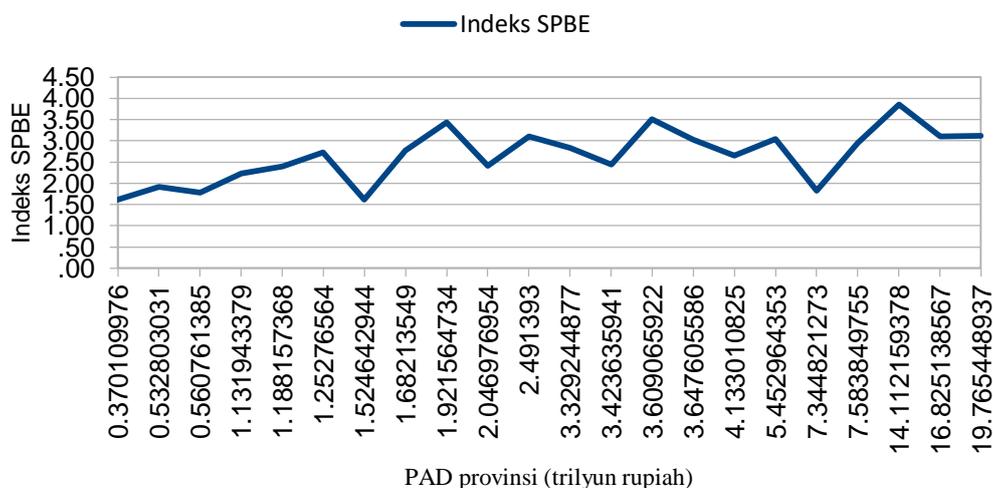
Fluktuasi nilai indeks SPBE terhadap besarnya PAD dapat terlihat pada Gambar 1 yaitu grafik indeks SPBE terhadap PAD provinsi.

Tabel 2. Urutan Provinsi Berdasarkan Nilai PAD Tahun 2019

No.	Provinsi	Indeks SPBE	PAD (ribu rupiah)
1	D	3.12	19.765.448.937
2	F	3.10	16.825.138.567
3	A	3.85	14.112.159.378
4	I	2.96	7.583.849.755
5	S	1.83	7.344.821.273
6	G	3.04	5.452.964.353
7	M	2.66	4.133.010.825
8	H	3.03	3.647.605.586
9	B	3.51	3.609.065.922
10	N	2.45	3.423.635.941
11	J	2.83	3.329.244.877
12	E	3.10	2.491.393.000
13	O	2.41	2.046.976.954
14	C	3.43	1.921.564.734
15	K	2.77	1.682.135.490
16	U	1.61	1.524.642.944
17	L	2.73	1.252.765.640
18	P	2.40	1.188.157.368
19	Q	2.24	1.131.943.379
20	T	1.78	560.761.385
21	R	1.91	532.803.031
22	V	1.61	370.109.976

Sumber: <http://spbe.go.id/moneval> dan <https://www.bps.go.id> (Data diolah).

Grafik Indeks SPBE terhadap PAD provinsi



Gambar 1. Grafik Indeks SPBE terhadap PAD Provinsi

Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa PAD yang besar tidak menjamin tingginya nilai indeks SPBE. Indeks SPBE tertinggi ke-dua dan ke-tiga bahkan dicapai oleh provinsi dengan PAD di bawah 5 (lima) trilyun rupiah. Dari grafik dapat disimpulkan bahwa indeks SPBE bukan merupakan fungsi dari PAD, karena grafik yang dihasilkan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak.

Pendanaan oleh Pemerintah atau Swasta

Hasil ini sebenarnya telah diprediksi oleh Söderström dan Melin (2019, p.126), bahwa ada beberapa kontradiksi dalam inovasi pemerintah lokal. Pemerintah lokal memiliki misi untuk menyediakan jasa bagi pembayar pajak. Mereka harus bekerja dalam batas peraturan untuk melakukan inovasi tanpa dana dari luar. Hal ini tampaknya dilaksanakan dengan baik oleh beberapa provinsi di Indonesia yang dapat mencapai indeks yang baik walaupun dengan dana terbatas.

Implementasi *e-government* di Nigeria (Adeyamo, 2011) melibatkan pihak non-pemerintah, yaitu *African Development Bank* untuk membangun infrastruktur telekomunikasi terlebih dulu. Hal serupa juga dilakukan di negara-negara anggota Uni Eropa, dalam hal implementasi *e-government* pada sektor publik pada periode 2009-2013 didanai oleh *European Union Structural Funds* (Ubaldi, 2011). Salah satu hal yang masih harus ditelusuri pada implementasi SPBE adalah pendanaan oleh swasta, selain yang sudah masuk melalui pajak ke dalam PAD.

Cara penilaian

Sundberg dan Gidlund (2017, p. 356) menyatakan bahwa harus ditentukan skala prioritas antara nilai yang didapat dari *e-government* dengan alokasi dana publik. Rorissa, Demissie, dan Pardo (2011, p.361) telah menjelaskan bahwa dengan adanya hasil *benchmarking* oleh pembuat kebijakan, praktisi, dan penyedia dana, pekerjaan berikutnya adalah melakukan mitigasi berbagai keterbatasan *framework* yang digunakan untuk mengukur indeks dan menghasilkan *ranking*. Instrumen yang digunakan untuk mengukur indeks SPBE di Indonesia telah memasukkan 2 (dua) di antara 35 indikator yang berhubungan dengan alokasi dana.

Kesiapan masyarakat

Implementasi *e-government* di Jordan yang dibahas oleh Al-Shboul, Rababah, Al-Shboul, Ghnemat, dan Al-Saqqa (2014, p.1123) dipengaruhi, diantaranya, oleh pendanaan dan koordinasi. Mereka juga mengidentifikasi tidak adanya kebijakan, dan *digital gap* dalam masyarakat sebagai kendala. Penelitian Overgaard (2011) juga menyinggung mengenai *digital gap*. Menurut Overgaard (2011), keengganan Kementerian Keuangan Denmark untuk menanamkan investasi pada *e-government* adalah karena 75% masyarakatnya tidak berhasil mengakses layanan yang disediakan. Khusus untuk Indonesia, Huda dan Yunas (2016) juga menyatakan bahwa diperlukan kesiapan masyarakat dalam menggunakan *e-government*, karena biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Dalam pemerintahan daerah, hal ini juga mencakup kesiapan jajaran administrasi pemerintahan untuk menggunakan SPBE.

Postur Belanja Daerah Tingkat Provinsi

Pada ringkasan APBD untuk tahun anggaran 2018, tercantum bahwa Belanja Pegawai mendapat porsi 25,9%, Belanja Barang dan Jasa 22,5%, Belanja Modal 17%, dan Belanja Lainnya 34,6%. Jika anggaran untuk SPBE dimasukkan dalam Belanja Barang dan Jasa, maka persinya tampak signifikan. Walaupun demikian, dari bukti yang ditunjukkan pada saat evaluasi, terbukti bahwa anggaran terkait SPBE tidak selalu sama dengan porsi tersebut di atas, karena adanya pos-pos lain yang termasuk dalam kategori yang sama.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Indeks SPBE provinsi-provinsi di Indonesia tidak berhubungan dengan PAD. Banyak faktor yang menyebabkan hasil ini. *Pertama*, adalah belum terbukanya pendanaan SPBE di tiap provinsi. Peraturan Pemerintah memang menyatakan bahwa dana SPBE diambil dari anggaran daerah masing-masing. Hal ini dinilai pada instrumen penilaian indeks SPBE, tetapi belum ditelusuri lebih jauh. Isu lain adalah pendanaan oleh pihak swasta untuk pengembangan SPBE. *Kedua*, kesiapan masyarakat akan mempengaruhi keberhasilan implementasi SPBE. Pemerintah daerah yang belum melihat kesiapan jajarannya dan masyarakat untuk menggunakan SPBE, akan cenderung lebih memprioritaskan bidang lain.

Saran

Masih banyak yang dapat diteliti sehubungan implementasi SPBE di Indonesia. Seperti telah dikatakan di awal penulisan ini, SPBE tidak hanya mencakup sistem, tetapi juga kebijakan dan tata kelola. Dengan demikian, penelitian ini juga dapat diperluas guna memasukkan domain tersebut. Terkait penelitian ini, yang dapat dilakukan lebih lanjut adalah eksplorasi lebih jauh mengenai pendanaan SPBE. Survey mengenai kesiapan jajaran pemerintahan dan masyarakat juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu tertentu. Selain itu, instrumen untuk menilai indeks SPBE yang baru dapat dipelajari untuk memprediksi keberhasilannya atau membandingkannya dengan instrumen yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeyamo, A.B. (2011). E-government implementation in Nigeria: An assessment on Nigeria's global e-gov ranking. *Journal of Internet and Information System*, 2(1), 11-19.
- Al-Shboul, M., Rababah, O., Al-Shboul, M., Ghnemat, R., & Al-Saqqa, S. (2014). Challenges and factors affecting the implementation of e-government in Jordan. *Journal of Software Engineering and Applications*, 7(13), 1111-1129.
- Aritonang, D.M. (2017). The impact of E-government system on public service quality in Indonesia. *European Scientific Journal*, 13(35), 99-111.
- BPS. (2019). *Statistik keuangan pemerintahan provinsi 2016-2019*. Retrieved April 13, 2020 from <https://www.bps.go.id>.
- Department of Economic and Social Affairs. (2018). *United Nations E-government Survey 2018*. New York: United Nations.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018). *Ringkasan APBD 2018*. Retrieved from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2018.pdf>.
- Huda, M., & Yunas, N.S. (2016). The development of e-government system in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 8(1), 97-108.
- Martins T.C.M., Zambalde A.L., Grützmann A., de Souza Bermejo P.H., de Almeida E.L., do Nascimento T.B.P. (2019) Value Innovation in the Public Sector: Concept, Determining Factors and Framework. In: Kó A., Francesconi E., Anderst-Kotsis G., Tjoa A., Khalil I. (eds) *Electronic Government and the Information Systems Perspective. EGOVIS 2019* (pp. 163-175). Lecture Notes in Computer Science, 11709. Springer, Cham
- Overgaard, J. (2011). The impact of the financial crisis on Danish e-government strategy. *European Journal of ePractice*, 11, 39-54.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Oktober 2018). Retrieved from <http://spbe.go.id/assets/images/42cd6e83a028c3eb408f559751ec41f8.PDF>.
- Rorissa, A., Demissie, D., Pardo, T.A. (2011). Benchmarking e-government: A comparison of framework for computing e-government index and ranking. *Government Information Quarterly*, 28(3), 354-362.
- Söderström, F., & Melin, U. (2019). *Creating local government innovation: Lessons learned from an institutional theory perspective*. In Lindgren, I., Janssen, M., Lee, H., Polini, A., Bolívar, M.P.R., Scholl, H.J., & Tambouris, E. (Eds.). *Electronic Government. Proceedings of the 18th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2019* (pp. 125-138), San Benedetto Del Tronto, Italy.
- Sundberg, L., & Gidlund, K.L. (2017). *Value-based decision making: Decision theory Meets e-government*. In Janssen, M., Axelsson, K., Glassey, O., Klievink, B., Krimmer, R., Lindgren, I., Parycek, P., Scholl, H.J., & Trutnev, D. (Eds.). *Electronic Government. Proceedings of the 16th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2017* (pp. 351-358), St. Petersburg, Russia.
- Tim SPBE. (2019). *Hasil monitoring dan evaluasi SPBE*. Retrieved April 13, 2020 from <http://spbe.go.id/moneval>.
- Ubaldi, B. (2011). The impact of the economic and financial crisis on e-government in OECD member countries. *European Journal of ePractice*, 11, 5-18.